

**EFEKTIFITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL KEPADA
PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL
KABUPATEN POHuwATO**

**OLEH
RANDY FRANSYE TUMEWU
NIM : S2115167**

S K R I P S I

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**EFEKTIFITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL
KEPADA PENYANDANG DISABILITAS OLEH
DINAS SOSIAL KABUPATEN POHUWATO****OLEH****RANDY FRANSYE TUMEWU****NIM : S.2115167**

Telah memenuhi syarat dan Dipertahankan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Tanggal Maret 2020

KOMISI PENGUJI

1. Edy Sijaya, S.I.P.,M.Si
2. Iskandar Ibrahim, S.I.P, M.Si
3. Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.I.P.,M.Si
4. Dr. Rusni Djafar, M.PA
5. H. Umar Sune S.Sos.,M.Si

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

DR. ARMAN, S.Sos.,M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Darmawaty Abdul Razak, S.I.P.,M.AP
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh – sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Marisa, 2020

Yang membuat pernyataan



ABSTRAK

Randy F. Tumewu : S2115167, 2020 "EFEKTIFITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN POHUWATO"

Permasalahan dalam penelitian ini adalah melihat Efektifitas pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat mendeskripsikan tentang masalah yang diangkat kemudian diterjemahkan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Sekretaris, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO, dan beberapa Keluarga Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan kesimpulan dimana pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato belum berjalan efektif. Hal ini dilihat dari berbagai indikator – indikator dalam penelitian ini yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Faktor kesadaran ditunjukkan kepada nilai – nilai kesadaran dari ASN dalam bekerja serta melihat bagaimana tingkat kesadaran masyarakat, khusus bagi masyarakat yang mempunyai anggota keluarga penyandang disabilitas dalam penanganannya melalui program rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.

Faktor organisasi melihat bagaimana peran dari Dinas Sosial merangkul atau bekerjasama dengan organisasi pemerintah maupun swasta lain yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam mensejahterakan kaum Disabilitas.

Faktor pendapatan mengarah pada anggaran yang tersedia yang dikhawatirkan kepada penyandang Disabilitas. Dimana anggaran yang tersedia akan menunjang setiap pelayanan Rehabilitasi Sosial dan menjadi faktor penunjang tingkat keefektifan dari program tersebut kepada kaum Disabilitas.

Faktor kemampuan dan ketrampilan ditunjukkan kepada SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial. SDM yang berkualitas akan mampu menopang dan menjawab setiap persoalan permasalahan yang sering ditemui dalam bekerja, pun sebaliknya bisa menjadi kendala apabila SDM yang dimiliki masih lemah akan menjadi penghambat dalam bekerja.

Faktor sarana pelayanan difokuskan pada ketersediaan tempat dimana para penyandang Disabilitas bisa ditampung disana sehingga proses rehabilitasi sosial bisa berjalan secara komprehensif.

Kata Kunci : Efektifitas, Rehabilitasi Sosial Disabilitas

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam organisasi pemerintah, pelayanan kepada masyarakat adalah tujuan utama yang telah menjadi kewajiban dalam menyelenggarakan pelayanan dengan menciptakan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layanan diberikan oleh pemerintah melalui aparatnya (pegawai/petugas) untuk memenuhi kepentingan umum atau kepentingan perorangan, yang bertumpu pada hak dasar sebagai warga negara. Bentuknya adalah bisa dalam layanan lisan, layanan dalam bentuk tulisan dan layanan dalam bentuk perbuatan. Ketiga bentuk layanan ini saling terkait, yang hasilnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan memuaskan bagi mereka yang dilayani (Moenir, 2000 : 204)

Selain itu, pemerintah juga mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan - pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin modernnya kehidupan manusia, dewasa ini pemerintah banyak mendapat sorotan publik terutama dalam hal pelayanan yang menuntut aparatur negara sebagai pelayan masyarakat memberikan pelayanan sebaik – baiknya menuju good governance, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri semakin kritis dalam menginginkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas yang menekankan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan

sebelumnya. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan rencana maka hal itu dikatakan tidak efektif. Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat (Siagian, 1987:76).

Selain itu, efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi agar dapat memuaskan masyarakat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Kata efektivitas itu sendiri, memiliki unsur- unsur yang menjadi perhatian kepada masyarakat. Mereka menuntut pelayanan yang efektif dalam berbagai hal, yakni dalam penyelesaian pekerjaan secara efektif berarti menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan kuantitasnya serta penggunaan sumber daya ataupun output yang minimal dalam mencapai hasil kerja yang maksimal.

Undang undang No 19 tahun 2011, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi hal itu terjadi dikarenakan berbagai alasan. Padahal hak tersebut telah diatur dalam undang-undang. Hak-hak tersebut sudah diatur oleh pemerintah yang

terdapat pada undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas. Ada pula Peppres No.75 tahun 2005 yang mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas. Serta UU No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah tercantum dalam Nawacita Pemerintahan Jokowi – JK dan telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Jadi sudah jelas penyandang disabilitas wajib dihargai dan diperlakukan dengan selayaknya serta dilindungi segala hak-haknya. Memang banyak sekali peraturan pemerintah untuk melindungi hak-hak bagi penyandang disabilitas, namun semua itu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa adanya dukungan dari semua pihak, agar terciptanya masyarakat inklusif berkesinambungan untuk pelayanan kepada penyandang disabilitas menuju Indonesia yang lebih baik.

Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas. Salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengenai rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Hal ini dimaksudkan agar dapat memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya,

serta memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Melalui rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diberikan materi - materi berupa penguatan mental, pengembangan kemampuan, dan pengembangan kreativitas sehingga tidak dianggap sebagai manusia yang tidak produktif. Disamping itu di ajarkan untuk mampu menghadapi lingkungan masyarakat, keluarga dan sebagainya agar ketika mereka masuk dan bergabung dengan masyarakat, tidak ada pandangan negatif terhadap penyandang disabilitas.

Tabel. 1
Jumlah Penyandang Disabilitas
(Data Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato)

Tahun	Jumlah
2017	809 jiwa
2018	923 jiwa

Berdasarkan data yang diperoleh selama 2 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato mengalami peningkatan, sedangkan jumlah yang tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato pada tahun 2017 yaitu sebanyak 76 jiwa dan di tahun 2018 sebanyak 110 jiwa. Jumlah tersebut merupakan keseluruhan dari jumlah disabilitas berdasarkan jenisnya, dan penangannya sangat terlalu rendah dibandingkan dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada.

Dikutip dalam (Kronologi.id) termuat jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pohuwato 2019 mencapai 922 orang. Ironisnya, meski sudah tercatat,

namun belum memiliki fasilitas yang memadai. Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO, mengatakan:

“sarana untuk menampung penyandang disabilitas di Pohuwato hanya di SLB. Jadi, penyandang disabilitas masih disekolahkan, tapi fasilitas seperti panti itu mereka tidak ada, ditambahkan, setelah mereka lulus dari SLB, langsung kembali ke keluarga lagi karena tidak memiliki tempat khusus seperti, balai latihan kerja penyandang disabilitas. “

Dari data Dinas Sosial jumlah penyandang Disabilitas dari tahun 2017 ke tahun 2019 yang mengalami peningkatan sedangkan jumlah yang tertangani tidak kurang dari 15% mengakibatkan banyaknya disabilitas yang berakifitas dengan masyarakat normal pada umumnya. Dalam kesehariannya para penyandang disabilitas ini hanya melakukan aktivitas yang sama sekali dapat membuat mereka terintimidasi karena pekerjaanya hanya berkeliaran dirumah warga, tidak sedikit dari mereka dijadikan objek penghinaan oleh orang – orang yang tidak bertanggung jawab dan adapun dari mereka dieksplorasi oleh oknum – oknum tertentu untuk mengemis. Disisi lain masyarakat awam seringkali menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan disabilitas dari pergaulan masyarakat.

Masalah tersebut merupakan salah satu penghambat perkembangan kepribadian maupun mentalnya padahal dalam mengembangkan kemampuannya, penyandang disabilitas perlu mendapatkan penguatan atau dukungan yang baik oleh

keluarga dan masyarakat dimana dia tinggal. Di samping itu keluarga penyandang disabilitas ini tampaknya belum atau kurang menyadari akan hak anggota keluarga mereka untuk memperoleh fasilitas pelayanan karena kurang informasi dan sosialisasi mengenai penyandang disabilitas. Oleh karena tidak dapat melakukan aktivitas secara selayaknya diakibatkan keterbatasan yang dimiliki maka penyandang disabilitas memerlukan bantuan dan pemenuhan kebutuhannya secara khusus dari pemerintah karena perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas.

Hal ini tentunya menjadi fokus perhatian pemerintah dalam hal ini Dinas sosial Kabupaten Pohuwato yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengatasi kesenjangan sosial untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada kaum disabilitas yang merupakan bagian dari warga masyarakat Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan seperti masyarakat normal pada umumnya, sehingga kaum disabilitas ini bukan menjadi kelompok masyarakat yang dikucilkan ataupun dikatakan sampah masyarakat akan tetapi mereka bisa diterima didalam kelompok masyarakat umum dan dalam dunia kerja.

Agar dapat berjalan dengan efektif, program harus mendapat dukungan dari semua pihak dan segala aspek penunjang dapat terpenuhi. Untuk mendukung program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas khususnya bagi penyandang disabilitas mental, diperlukan adanya suatu kesinambungan secara menyeluruh dalam implementasi program ini, baik dalam sumber daya manusia yang terlibat didalamnya, kemampuan dan pengalokasian anggaran dalam menunjang kegiatan,

serta kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap program rehabilitasi sosial, agar dapat memberikan umpan balik bagi perencana dalam membuat perencanaan kedepan yang lebih baik lagi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIFITAS PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL KEPADA PENYANDANG DISABILITAS OLEH DINAS SOSIAL KABUPATEN POHuwATO”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat pada penelitian ini adalah : Bagaimana efektifitas pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pada dasarnya memiliki tujuan penelitian yang hendak dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya akan di peroleh hasil yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi peneliti maupun bagi pihak lain yang membutuhkan.

1. Manfaat Akademik

Manfaat dari segi akademis adalah dapat membantu civitas akademika yang ingin mengkaji lebih lanjut tentang pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dapat dijadikan bahan referensi atau masukan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama dan juga bagi Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada penyandang disabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah daya guna, keaktifan, serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

Menurut Pasolong (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan istilah ini digunakan sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Sedangkan Richard (2006:270) menyatakan efektivitas adalah tingkat tujuan yang diwujudkan suatu organisasi.

Selanjutnya, Menurut H. Emerson seperti yang dikutip Handayanigrat (1994:16) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya maka dikatakan efektif, sedangkan kalau

tujuan atau sasaran itu tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka pekerjaan itu tidak efektif.

Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi (1985:50), mengemukakan bahwa : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sesuatu dikatakan efektif apabila suatu tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan dengan tetap berusaha mempertahankan diri atau mengejar sasaran.

Menurut Sondang dalam Othenk (2008: 4), efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.

Efektivitas adalah suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”. Jadi, efektivitas organisasi adalah tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran. Dengan demikian, pengertian efektivitas dalam beberapa definisi di atas menunjukkan pada kualifikasi sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang menggambarkan tentang keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dengan pemakaian proses yaitu pemilihan cara-cara yang sesuai dengan tujuan.

Amin Tunggul Widjaya (1993:32) mengemukakan: “Efektivitas adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan”. Selanjutnya Permata Wesha (1992:148) mengatakan : Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk membrikan guna yang diharapkan untuk melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan sosial.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang ditetapkan. Efektivitas kerja adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak, sangat

tergantung pada penyelesaian tugas tersebut bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Hal ini lebih menekankan pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan organisasi.

2.2. Ukuran Efektifitas

Keluaran (output) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (output) tidak berwujud (intangible) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (outcome) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (judgement), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya “Individual and Society” yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya “Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok” menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (dalam Danim, 2004:119-120).

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran dari pada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektivitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapai tujuan secara efektif atau tidak, sebagaimana yang dikemukakan oleh Siagian (1987:77) yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijakanaan yang mantap
4. Penyusunan program yang matang
5. Penyusunan program yang mantap
6. Tersedianya sarana dan prasarana

7. Pelaksanaan efektif dan efisien
8. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik

Dalam mencapai tujuan yang efektif belum tentu dapat dikatakan efisien karena efisien merupakan hasil perbandingan input dan output. Namun apabila tercapainya suatu tujuan dengan efisien maka dengan sendirinya juga adalah efektif. Jadi efektifnya sesuatu tergantung kepada pencapaian tujuan tepat pada waktunya, tanpa memperbandingkan dengan faktor yang mendukung sesuatu usaha atau pekerjaan. Menurut pendapat Agung Kurniawan (2005:107) yang dikutip James L. Gibson dalam bukunya “Transformasi Pelayanan Publik ” menyebutkan ukuran efektivitas yaitu:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini ditujukan supaya karyawan atau pekerja dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai target dan sasaran yang terarah sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, merupakan penentuan cara, jalan atau upaya yang harus dilakukan dalam mencapai semua tujuan yang sudah ditetapkan agar para implemter tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi. Seperti penentuan wawasan waktu, dampak dan pemasatan upaya.
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan yang sudah dirumuskan tersebut harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, diperlukan untuk pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh organisasi untuk mengembangkan program atau kegiatan dimasa

yang akan datang. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tetap sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman untuk bertindak dan bekerja.

5. Tersediannya sarana dan prasarana, dibutuhkan untuk menunjang proses dalam pelaksanaan suatu program agar berjalan dengan efektif.
6. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, apabila suatu program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuannya.
7. Sistem pengawasan dan pengendalian, pengawasan ini diperlukan untuk mengatur dan mencegah kemungkinan - kemungkinan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan suatu program atau kegiatan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

2.3. Pengertian Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Sedangkan, pengertian pelayanan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pelayanan adalah menolong menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Pelayanan dapat diberikan kepada orang lain sebagai pertolongan yang dibutuhkan orang lain itu sendiri. Yang mana dengan pertolongan tersebut dapat membantu orang lain untuk bisa mengatasi masalahnya.

Menurut Sampara Lukman (2000: 5) pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan definisi yang lebih

rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto(2005: 2) yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hak-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga pemerintahan dan perusahaan.

Menurut Moenir, A.S (2008: 27) mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Selanjutnya Lijan Poltak Sinambela (2008: 5) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Berdasarkan pengertian tersebut pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat yang dapat memberikan rasa puas lewat suatu kegiatan atau program yang dilakukan.

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya terbagi atas dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya pribadi serta layanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi (organisasi massa atau organisasi negara). Berdasarkan pendapat tersebut yang dimaksud dengan pelayanan adalah kegiatan yang berkesinambungan dalam kehidupan sehari-hari yang berupa layanan fisik

yaitu bersifat pribadi dan administratif yang biasa terdapat pada suatu kegiatan organisasi.

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa pelayanan public adalah “Segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

2.4. Efektifitas Pelayanan

Hidayat dalam majalah Prisma menyatakan efektivitas pelayanan adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, waktu) telah dicapainya. Dari defenisi tersebut terlihat adanya dua faktor utama yang terkandung di dalamnya, yakni adanya hasil atau akibat dan adanya tujuan yang dicapai. Adanya hasil atau akibat merupakan hasil untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Emerson yang dikutip oleh Soewarno (1994:16) menyatakan bahwa efektivitas pelayanan adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditemukan sebelumnya. Sedangkan menurut Sondang P. Siagian (1987:151) efektivitas pelayanan adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak, sangat tergantung pada penyelesaian tugas tersebut dengan waktu yang ditetapkan. Sebagai salah satu strategi layanan yang efektif adalah sumber daya manusia yang diharapkan memiliki sikap, perilaku, pengetahuan, dan kemampuan yang mendukung efektivitas realisasi strategi layanan. Hasil kegiatan pegawai yang

berwujud pelayanan – pelayanan di samping efisien juga dihasilkan dengan cara tata kerja, prosedur kerja, system kerja yang efisiensi. Haruslah juga memenuhi persyaratan bahwa efektivitas pelayanan tersebut merupakan pelayanan yang :

- a. Efektif yaitu pelayanan tersebut baik corak maupun kegunaannya benar – benar sesuai dengan kebutuhan kegiatan dalam mencapai tujuan organisasi.
- b. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yaitu bahwa pelayanan itu telah diolah/disusun atas dasar data, fakta, angka atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku hingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Sehat yaitu bahwa pelayanan itu disampaikan melewati hirarki dan tata hubungan yang telah ditetapkan dan dalam suasana komunikasi yang baik.
- d. Memuaskan yaitu bahwa pelayanan tersebut diberikan dengan cepat, tepat waktunya, rapi serta tanpa kesalahan teknis seperti pengetikan, penjumlahan, penjilidan dan lain – lain.

Dalam pelayanan umum terdapat beberapa faktor yang penting guna tercipta dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif. Seperti yang dikemukakan oleh H.A.S Moenir (2006:88) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia”, adalah sebagai berikut:

1. Faktor kesadaran

Adanya kesadaran dapat membawa seseorang kepada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan suatu kehendak. Kehendak dalam lingkungan organisasi kerja tertuang dalam bentuk tugas, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengikat semua orang dalam organisasi kerja. Karena itu dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, diharapkan dapat

melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. Kelebihan dan tingkah laku orang lain jika disadari lalu dikembangkan dapat menjadi faktor pendorong bagi kemajuan dan keberhasilan.

2. Faktor organisasi

Organisasi pada dasarnya tidak berbeda dengan organisasi pada umumnya, namun ada perbedaan sedikit dalam penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus, kepada manusia yang mempunyai dan kehendak multikompleks, kepada manusia yang mempunyai dan kehendak multikompleks. Oleh karena itu organisasi yang dimaksud disini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak pada pengaturan dan mekanisme kerjanya yang harus mampu menghasilkan pelayanan yang memadai.

3. Faktor pendapatan

Pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga, dana, serta pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya maupun keluarganya.

4. Faktor kemampuan dan keterampilan

Kemampuan yang dimaksud disini adalah keadaan yang ditujukan pada sifat atau keadaan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan atas ketentuan-ketentuan yang ada. Istilah yang “kecakapan” selanjutnya keterampilan adalah kemampuan melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan pengetahuan kerja yang tersedia. Dengan

pengertian ini dapat dijelaskan bahwa keterampilan lebih banyak menggunakan unsur anggota badan dari pada unsur lain.

5. Faktor sarana pelayanan

Sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis pelayanan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi social dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Fungsi sarana pelayanan itu antara lain:

- a. Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu.
- b. Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.
- c. Kualitas produk yang lebih baik.
- d. Kecepatan susunan dan stabilitas terjamin.
- e. Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.
- f. Menimbulkan perasaan puas orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai target – targetnya yang ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka efektivitas menggambarkan

seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

2.5. Pengertian Disabilitas

Istilah disabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu different ability yang artinya manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan menunjuk pada penyandang disabilitas, Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

Penyandang cacat merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang sangat penting untuk segera diatasi mengingat populasinya yang cukup besar dalam masyarakat terutama bagi mereka yang menyandang cacat tubuh (fisik). Dengan adanya kondisi sosial seperti ini, tentunya dibutuhkan peran dari pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial secara berkesinambungan dan menyeluruh, terpadu dan sinergis melakukan tugas pelayanan kepada kaum Disabilitas bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial pemerintah, maupun lembaga sosial non pemerintah.

Definisi Penyandang Disabilitas Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization tahun 1980 pengertian penyandang disabilitas dibagi menjadi 3 hal, yaitu :

- a. Impairment : diartikan sebagai suatu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomic.
- b. Disability : suatu ketidakmampuan atau keterbatasan sebagai akibat adanya impairment untuk melakukan aktivitas dengan cara yang dianggap normal bagi manusia.
- c. Handicap : kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat baik dibidang sosial ekonomi maupun psikologi yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologis maupun tubuh dan ketidakmampuannya melaksanakan kegiatan hidup secara normal.

2.6. Rehabilitasi

Rehabilitasi didefinisikan sebagai "satu program holistik dan terpadu atas intervensi-intervensi medis, fisik, psikososial, dan vokasional yang memberdayakan seorang (individu penyandang cacat) untuk meraih pencapaian

pribadi, kebermaknaan sosial, dan interaksi efektif yang fungsional dengan dunia” (Banja,1990:615). Menurut Soewito dalam (Sri Widati, 1984:5) menyatakan bahwa: Rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi continuous process, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat dan Negara.

Tujuan dari rehabilitasi itu sendiri tertuang dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1997 dijelaskan bahwa Rehabilitasi diarahkan untuk memfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penyandang cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu pencapaian kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.

2.7. Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Berdasarkan ketentuan Permensos Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah biasanya diwujudkan dalam bentuk:

- Motivasi dan diagnosis psikososial

Upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

- Perawatan dan Pengasuhan

Upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.

- Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan

Usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

- Bimbingan mental spiritual

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

- Bimbingan fisik

Kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.

- Bimbingan sosial dan konseling psikososial

Semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

- Pelayanan aksesibilitas

Penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

- Bantuan dan asistensi sosial

Upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

- **Bimbingan resosialisasi**

Kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

- **Bimbingan lanjut**

Kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial, dan khususnya bagi Penyandang Disabilitas fisik.

- **Rujukan**

Pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

- Mengusahakan persamaan pendidikan sesuai dengan jenjang.

2.8. Kerangka Pemikiran

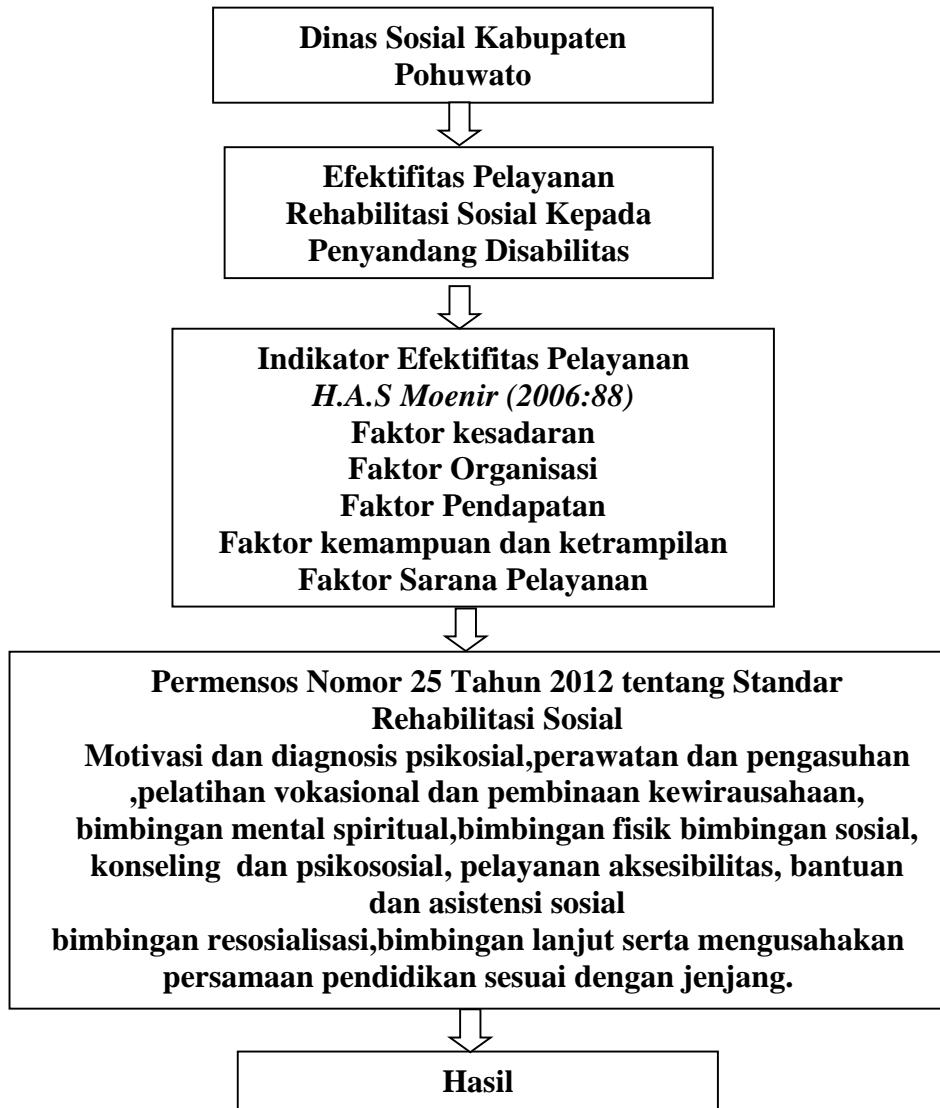
Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan. Efektivitas salah satu dimensi dari produktivitas (hasil) yaitu mengarah pada pencapaian unjuk kerja yang maksimal.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan. Pelayanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial mempunyai peran penting dalam perkembangan dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang merupakan suatu program yang dibuat berdasarkan Undang - undang untuk di jalankan demi memenuhi hak – hak disabilitas.

Dari keseluruhan kerangka pemikiran diatas maka dapat disimpulkan dimana pelayanan merupakan sebuah proses yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektifitas karena tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan itu sangat bergantung pada setiap proses pelayanan yang tentunya berjalan sesuai prosedur dan standar yang sudah ditetapkan.

Untuk lebih jelas arah penelitian maka peneliti menggambarkan skema penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran



BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menentukan objek dalam penelitian ini adalah Efektifitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Mental di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini direncanakan kurang lebih 3 bulan.

3.2. Desain Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat –sifat setiap individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Metode kualitatif deskriptif ini berusaha untuk mencari atau menggali informasi mengenai permasalahan yang ada kaitannya dengan program pelayanan Rehabilitasi Sosial yaitu tentang “ Efektivitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kepada Penyandang Disabilitas “ di Kabupaten Pohuwato.

3.3. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjabaran konsep atau variabel yang diteliti dalam rincian yang terukur. Menurut Singaribun (2006: 33), konsep adalah abstraksi mengenai sebuah fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu yang

menjadi pusat perhatian. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari interpretasi ganda dari variabel yang diteliti. Oleh karena itu, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing – masing konsep yang akan diteliti, maka definisi konsep yang dikemukakan penulis adalah :

1. Efektivitas pelayanan berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota serta merupakan keterkaitan antara tujuan dan hasil yang dinyatakan, dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai.
2. Permensos Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial motivasi dan diagnosis psikosial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling dan psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, rujukan, dan mengusahakan persamaan pendidikan sesuai dengan jenjang.
3. Faktor yang penting guna tercipta dan terwujudnya pelaksanaan pelayanan secara efektif dikemukakan oleh H.A.S Moenir (2006:88) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia”, adalah sebagai berikut:
 - a) Faktor kesadaran
 - b) Faktor Organisasi
 - c) Faktor Pendapatan
 - d) Faktor kemampuan dan ketrampilan
 - e) Faktor Sarana Pelayanan

3.4. Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang memiliki pengetahuan serta memahami tentang masalah yang diteliti. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato	1 orang
2. Sekretaris	1 orang
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1 orang
4. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Disabilitas	1 orang
5. Keluarga Penyandang Disabilitas	5 orang
Total Informan	9 orang

3.5. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pada responden yang akan ditentukan melalui teknik random sampling di lokasi penelitian melalui pengamatan langsung dan wawancara.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang diperoleh dari, literature, dokumen, serta laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yakni berupa data gambaran umum kantor.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala – gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap objek penelitian ini untuk

memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal – hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam pengumpulan data dimaksudkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian – bagian yang dianggap penting yang dianggap penting yang terdapat baik di lokasi penelitian maupun di intansi yang ada hubungannya dengan lokasi penelitian.

3. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data – data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara dilakukan penulis dengan sejumlah informan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3.7. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dengan cara menggambarkan konteks dari telaah pustaka dan menggambarkan pertanyaan dari hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam penulis dengan para informan dengan data yang akurat. Hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, lalu direduksi dan hasil reduksi tersebut di kelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*Display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk content dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab

rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Umum Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato adalah kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran dari Kabupaten Boalemo. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabupaten Pohuwato merupakan kabupaten yang berada di ujung Barat Provinsi Gorontalo dengan letak Geografis antara 00°.22'0" – 0° 0'.57'0" Lintang Utara dan 1210°.23'0" – 1220°.19'0" Bujur Timur, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 26,00°C – 27,60°C, dengan luas wilayah sebesar 4.244,31 Km² atau 36,77 % dari total luas Provinsi Gorontalo

Kabupaten Pohuwato secara administratif sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol (Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Sumalata (kabupaten Gorontalo), sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini, sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Parigi Moutong (Sulawesi Tengah) dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boalemo. Letak yang strategis Kabupaten Pohuwato yaitu berada di wilayah tengah dari Kawasan Teluk Tomini, berhadapan langsung dengan daerah wisata International yaitu Pulau Togian di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah dengan waktu tempuh dari Kota Marisa sekitar 2 Jam melalui jalur laut (speedboat). Adanya pelabuhan laut dan pelabuhan ferry akan menjadikan Kabupaten Pohuwato menjadi daerah pemicu perkembangan daerah-daerah di kawasan Teluk Tomini.

Selain itu, letak Kabupaten Pohuwato yang berada di jalan poros Trans Sulawesi yang dilintasi oleh jalur transportasi darat dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, sangat menunjang percepatan perkembangan ekonomi daerah. Secara administratif Kabupaten Pohuwato terbagi atas 13 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Marisa
2. Kecamatan Buntulia
3. Kecamatan Duhiadaa
4. Kecamatan Dengilo
5. Kecamatan Paguat
6. Kecamatan Randangan
7. Kecamatan Taluditi
8. Kecamatan Wanggarasi
9. Kecamatan Patilanggio
10. Kecamatan Lemito
11. Kecamatan Popayato
12. Kecamatan Popayato Barat
13. Kecamatan Popayato Timur

Adapun peta Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Peta Kabupaten Pohuwato



4.1.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 14 Tahun 2011, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato. Dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan partisipasi masyarakat dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengawasan teknis dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Teknologi Tepat Guna;
- d. Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- e. Penyusunan rencana kegiatan di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1 : Sumber Daya Manusia

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Jumlah Pegawai	60 Orang (L : 31 , P : 29)
2.	Kualitas Pendidikan :	
	- SD Sederajat	-
	- SMP Sederajat	-
	- SMA Sederajat	25 Orang (L : 16 , P : 9)
	- D1 / D2 / D3	1 Orang (L : 1)
	- S1 Sederajat	33 Orang (L : 14 , P : 19)

	- S2 Sederajat	1 Orang (L : 1)
3.	Pangkat / Golongan :	
	- Golongan I	-
	- Golongan II a	-
	- Golongan II b	2 Orang
	- Golongan II c	6 Orang
	- Golongan II d	-
	- Golongan III a	10 Orang
	- Golongan III b	3 Orang
	- Golongan III c	5 Orang
	- Golongan III d	6 Orang
	- Golongan IV a	2 Orang
	- Golongan IV b	1 Orang
	- Golongan IV c	1 Orang
4.	Jumlah Pejabat Struktural	
	- Eselon I	-
	- Eselon II	1 Orang
	- Eselon III	5 Orang
	- Eselon IV	9 Orang
5.	Jumlah Pejabat Fungsional	

6.	Non PNS (Abdi/Honor,Sopir, CS, Operator)	24 Orang
----	--	----------

(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

Tabel 3.2 : Komposisi PNS dan CPNS pada Unit Kerja berdasarkan Pangkat / Golongan dan Pendidikan

No.	Jabatan	Pangkat / Gol.	Pendidikan
A	KEPALA DINAS		
	Kepala Dinas	Pembina utama Muda (IV c)	S1 (L)
B	SEKRETARIS		
	Sekretaris	Pembina Tk. I (IV b)	S2 (L)
	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum		
	Kasubag	Penata Muda Tk. I (III b)	S1 (P)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (P)
	Staf	Pengatur Muda Tk. I (II b)	SMA (L)
	Sub Bagian Perencanaan		
	Kasubag	Penata / III c	S1 (P)
	Staf	Penata Muda Tk. I (III b)	S1 (P)
	Sub Bagian Keuangan		
	Kasubag	Penata (III c)	S1 (P)

	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda (III a)	S1 (P)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (P)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (L)
	Staf	Pengatur (II c)	SMU (P)
C	BIDANG REHABILITASI DAN PELAYANAN SOSIAL		
	Kabid	Penata Tk. I (III d)	S1 (P)
	Sub Bidang Pelayanan Sosial		
	Kasubag	Penata Tk. I (III d)	S1 (P)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (L)
	Sub Bidang Rehabilitasi Sosial		
	Kasubag	Penata Muda Tk. I (III b)	S1 (L)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (L)
D	BIDANG BIMBINGAN DAN BANTUAN SOSIAL		
	Kabid	Penata Tk. I (III d)	S1 (P)
	Sub Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial		
	Kasubag	Penata Tk. I (III d)	S1 (P)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (L)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (L)
	Sub Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial		
	Kasubag	Penata (III c)	S1 (L)

	Staf	Pengatur (II c)	SMA (L)
	Staf	Pengatur (II c)	SMA (P)
BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN, PENGELOLAAN SDA DAN TTG			
E Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan TTG			
	Kasubag	Penata Tk. I (III d)	S1 (L)
Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Pedesaan			
	Kasubag	Penata Muda Tk. I (III b)	S1 (L)
	Staf	Penata Muda (III a)	S1 (P)
F BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT			
Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Desa/Kelurahan			
	Kasubag	Penata (III c)	S1 (L)
	Staf	Pengatur Muda Tk. I (II b)	SMU (L)
Sub Bidang Pendataan, Tata Administrasi Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan			
	Kasubag	Penata Tk. I (III d)	S1 (P)

	Staf	Pengatur (II c)	SMA (L)
	Staf	Pengatur (II c)	SMU (P)

(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

**Tabel 3.3 : Komposisi Non PNS (Sopir, CS, Operator)
Berdasarkan Pendidikan**

No.	Jabatan	Pendidikan (Bidang Studi)
A	Sub Bagian Keuangan	
1.	Staf	S1 (L)
2.	Staf	SMK (P)
B	Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Pemanfaatan TTG	
1.	Staf	S1 (L)
C	Sub Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial	
1.	Staf	S1 (P)
2.	Staf	S1 (P)
3.	Staf	SMA (L)
D	Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Kawasan Desa/Kelurahan	
1.	Staf	S1 (P)
2.	Staf	SMK (P)
3.	Staf PKK	S1 (P)

4.	Operator PKK	SMA (L)
E	Sub Bidang Pendataan, Tata Administrasi Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan	
1.	Staf	S1 (P)
2.	Staf	SMA (L)
3.	Staf	SMA (P)
F	Kasubag Kepegawaian dan Umum	
1.	Sopir Mobil Dinas	SMK (L)
2.	Sopir Mobil Resque	SMK (L)
3.	Sopir Mobil Truck	SMA (L)
4.	Sopir Mobil Tangki	SMA (L)
5.	Cleaning Service Dinas	SMA (P)
6.	Cleaning Service Dinas	SMA (L)
7.	Cleaning Service PKK	SMA (P)
8.	Cleaning Service Panti Asuhan	SMA (L)
9.	Cleaning Service Panti Asuhan	SMA (P)
10.	Cleaning Service PKH	SMA (L)
G	Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur Pedesaan	

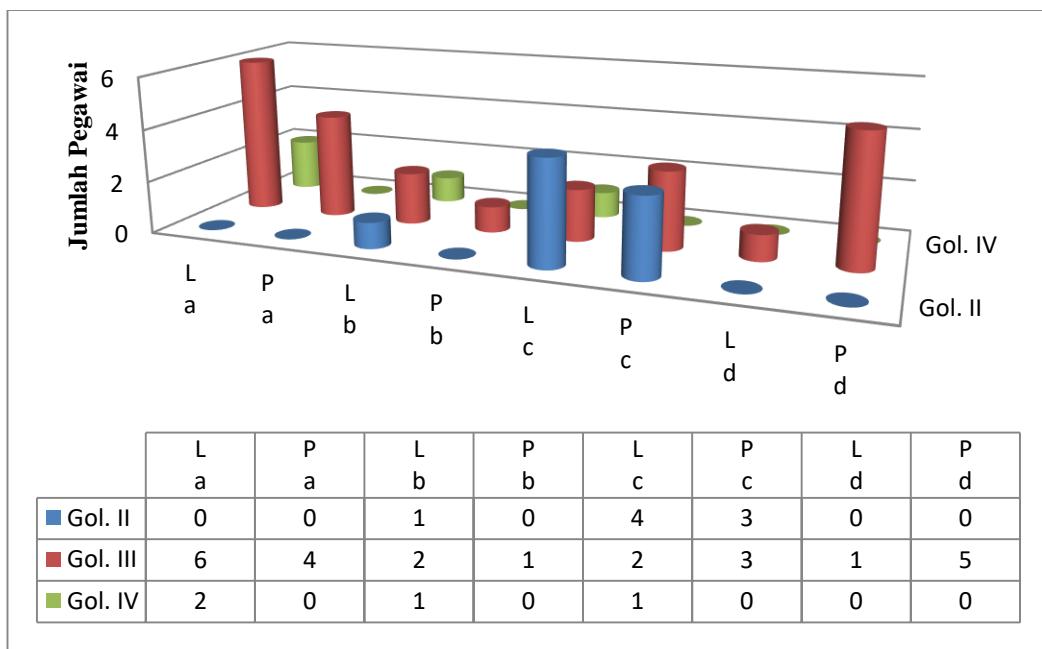
(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

Gambar 3.2 : Grafik Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat



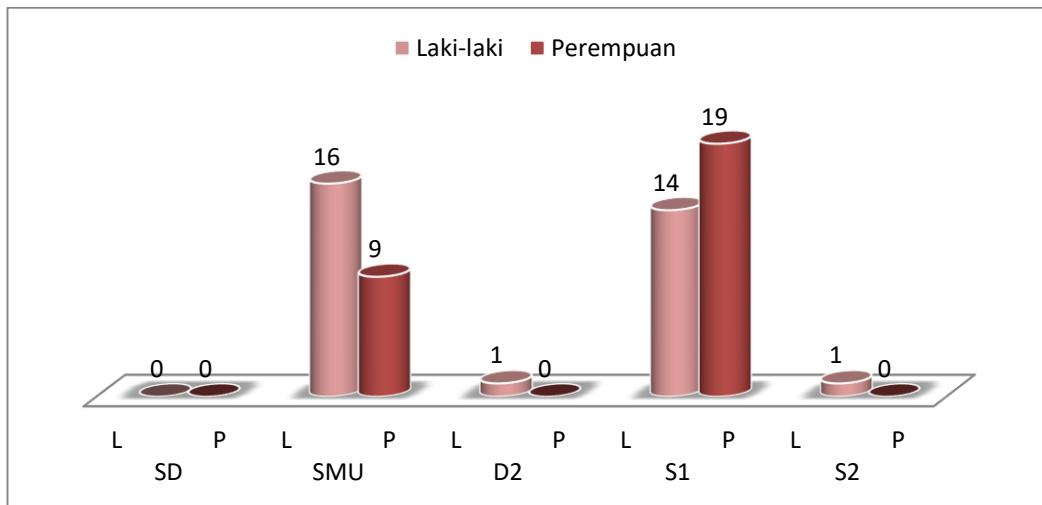
(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

Gambar 3.3 : Data Pilah Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Pangkat/Golongan



(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

Gambar 3.4 : Data Pilah Pegawai Dinas Sosial dan Pemberdayaan Kabupaten Pohuwato Berdasarkan Pendidikan



(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

Berdasarkan gambaran tampilan grafik tersebut bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikategorikan memenuhi konteks *issue responsig gender* baik sisi jumlah yang berimbang antara laki-laki dan perempuan (L 32 – P 28) termasuk tingkat pendidikan. Walaupun pada sisi lain masih membutuhkan perhatian khususnya bagi perempuan mengenai pengetahuan teknis, dalam hal ini guna memenuhi target kesetaraan baik kapasitas maupun kuantitas ketersediaan sumber daya manusia baik laki-laki dan perempuan.

Namun dari aspek ketersediaan kualitas sumber daya manusia yang menggerakkan sistem atas tupoksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, jika dilihat dari kualifikasi pendidikan masih membutuhkan intervensi khusus peningkatan kapasitas baik berupa pengetahuan teknis maupun penjabaran operasional.

A. Kinerja Pelayanan Dinas

Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengamati keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar memberikan kecenderungan timbulnya masalah sosial, seperti anak terlantar, wanita rawan sosial, penyandang cacat hingga tuna susila. Terdapat juga permasalahan sosial yang berasal dari keluarga seperti keluarga yang berumah tak layak huni dan keluarga fakir miskin. Masyarakat dengan masalah-masalah sosial seperti ini seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah untuk menjadi salah satu sasaran program pembangunan. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di Kabupaten Pohuwato masih relative tinggi, hal ini terlihat pada masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Pohuwato sebagai berikut :

**Tabel 3.4 : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Di Kabupaten Pohuwato pada Tahun 2016**

NO.	JENIS PMKS	JUMLAH (JIWA)	KET.
1	Anak Balita terlantar	34	
2	Anak Terlantar	373	
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	38	
4	Anak Jalanan	22	
5	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	73	
6	Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan	23	
7	Anak yang Memerlukan Perhatian Khusus	2	

8	Lanjut Usia Terlantar	2,208	
9	Penyandang Disabilitas	705	
10	Tuna Susila	4	
11	Gelandangan	1	
12	Pengemis	4	
13	Pemulung	1	
14	Kelompok Minoritas	0	
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	108	
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	28	
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	4	
18	Korban Trafficking	0	
19	Korban Tindak Kekerasan	18	
20	Pekerja Migran	0	
21	Korban Bencana Alam	640	
22	Korban Bencana Sosial	47	
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2,438	PKH
24	Fakir Miskin	11,495	RTSM
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	16	
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1,922	
JUMLAH TOTAL		20,204	

(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

Sasaran pelayanan urusan sosial dan pemberdayaan masyarakat adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

4.1.3. Visi dan Misi Kantor Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato

Adapun visi dan misi kantor Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato diuraikan sebagai berikut :

- **Visi**

“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat”

- **Misi**

1. Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial dan jaminan sosial bagi PMKS dan PSKS
2. Meningkatkan rasa kepedulian sosial dengan membangun kesadaran, empati, kesetiakawanan, gotong royong dan tanggung jawab sosial
3. Meningkatkan pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana perdesaan melalui pemanfaatan sumber daya alam dan TTG yang berwawasan lingkungan

4. Mewujudkan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi unggulan pedesaan menuju desa mandiri
5. Meningkatkan penyediaan data kemiskinan yang berkualitas
6. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat

- **Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan asumsi – asumsi strategis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui peran PSKS dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial dan pemerataan pelayanan sosial.
2. Menumbuh kembangkan rasa kepedulian sosial , tanggung jawab sosial dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan PMKS
3. Mewujudkan pemukiman berbasis masyarakat dengan lingkungan sehat dan terpadu
4. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan SDM Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang transparan dan akuntabel

- **Strategi**

- ❖ Meningkatkan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui upaya-upaya rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial bagi PMKS.

- ❖ Meningkatkan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS).
- ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas bantuan/jaminan sosial bagi PMKS.
- ❖ Menyediakan akses pelayanan Sosial serta sarana dan Prasarana Ekonomi bagi masyarakat/ lembaga kessos.
- ❖ Meningkatkan Kemandirian para penyandang masalah sosial (PMKS).
- ❖ Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

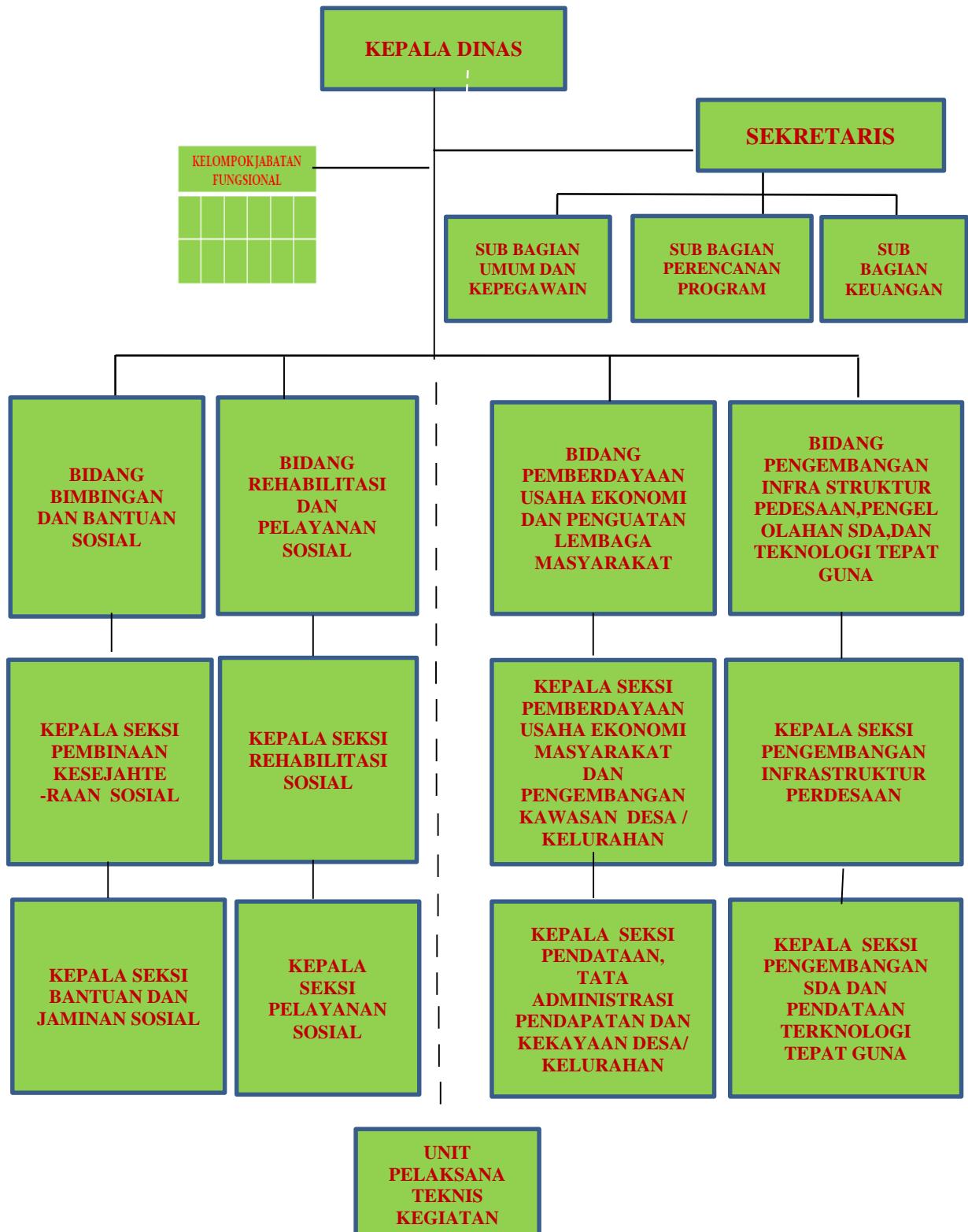
- **Kebijakan**

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pembangunan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016 -2021, pada bidang sosial diprioritaskan untuk peningkatan kualitas SDM dan aparat bidang kesejahteraan kemandirian para PMKS, peningkatan profesionalisme pembinaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial, peningkatan pengetahuan dan keterampilan penanganan masalah kesejahteraan sosial, serta peningkatan kepedulian sosial.

(Sumber Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

4.1.4. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 3.5 : Struktur Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato

(Sumber : Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 – 2021)

4.1.5. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Dari struktur organisasi kantor Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato diatas, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No 14 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato panduan bagi setiap satuan kerja Pemerintah Daerah diuraikan sebagai berikut :

A.Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan program di bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan program/kebijakan teknis dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dalam bidang social dan pemberdayaan masyarakat;
- Pengkoordinasian dan pengendalian program penanggulangan masalah social dan pemberdayaan masyarakat;
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang penanggulangan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat;

- Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang social dan pemberdayaan masyarakat;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Sosial

Sekretariat mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, keuangan, asset, perencanaan dan pelaporan;
- Pemberian pelayanan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan, kearsipan, dokumentasi kegiatan, asset serta evaluasi dan pelaporan;
- Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bimbingan dan Bantuan Sosial

- Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang pembinaan kesejahteraan sosial dan bantuan dan jaminan sosial;

- Penyelenggaraan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berhubungan dengan bidang bimbingan dan bantuan sosial;
- Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Kelembagaan Sosial Masyarakat;
- Peningkatan pelayanan dan pemrosesan izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) serta pembinaan dunia usaha yang mempunyai kepedulian sosial;
- Melakukan penanganan bagi korban bencana alam, korban bencana sosial, pekerja migran dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;
- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

- Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial;
- Penyusunan rencana kegiatan dibidang penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan pelayanan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Menyelenggarakan, memfasilitasi dan mengendalikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah ketelantarhan, kecacatan dan ketunaan sosial;
- Memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS);

- Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan pelayanan sosial;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Penguatan Kelembagaan

- Penyusunan rencana kerja lingkup bidang;
- Medata serta mengolah data sebagai bahan penyusunan program/kegiatan pengembangan, peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa/kelurahan;
- Merangsang dan memotivasi masyarakat desa meningkatkan taraf hidup dengan memberikan bimbingan teknis usaha ekonomi, ketrampilan mengelola usaha/manajemen usaha;
- Memberikan pembinaan dan bimbingan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat;
- Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat di desa tertinggl dan terpencil;
- Mengadakan inovasi kelembagaan secara terus menerus dan terorganisasi dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- Mengadakan rapat intern maupun rapat lintas instansi terkait dalam rangka pemberdayaan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4.2. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk melihat sejauh mana efektifitas pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dengan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh H.S Munir tentang efektifitas pelayanan merujuk pada Permendikbud Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial kepada penyandang disabilitas. Adapun indikator – indikator tersebut yakni, faktor kesadaran, faktor organisasi, faktor pendapatan, faktor kemampuan dan ketrampilan, serta faktor sarana pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para informan dalam penelitian, maka diperoleh gambaran tentang bagaimana keefektifan pelayanan rehabilitasi sosial yang sudah berjalan selama ini di lingkungan Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato yang dilihat dari beberapa indikator - indikator diatas yang dapat diuraikan sebagai berikut :

4.2.1. Faktor Kesadaran

Dalam penelitian ini faktor kesadaran di lingkungan pemerintahan Dinas Sosial sangat berperan penting. Menyadari sebagai ASN yang bekerja di bidang sosial tentu bukan hanya mengetahui tupoksi dalam bekerja, namun lebih dari itu setiap ASN yang ada harus menyadari bahwa tugas dibidang sosial harus dibarengi dengan jiwa sosial yang tinggi. Mengatas kesenjangan sosial yang ada dibutuhkan sikap kepedulian untuk melayani masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial yang sangat kompleks.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas sosial dengan inisial A.J. dikatakan bahwa :

“ Setiap pegawai benar – benar menyadari tupoksinya khususnya di bidang rehabilitasi sosial bahwa kita banyak melayani masyarakat yang berkebutuhan khusus, artinya dari seluruh PMKS(penyandang masalah kesejahteraan sosial) yang ada itu dibahas dan dieksekusi secara tepat, contohnya orang dengan cacat secara mental berkeliaran di rumah warga, itu kita datangi dan menghubungi pihak keluarga dimana yang bersangkutan perlu penanganan secara khusus lewat program – program dari Dinas Sosial. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penanganan Disabilitas, dari tahun ke tahun Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berupaya mensosialisasikan program – program dari Dinas Sosial kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaporkan apabila ada kasus – kasus tentang Disabilitas, itu yang sementara kita lakukan “. (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019)

Sejalan dengan pernyataan diatas, melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, beliau mengatakan bahwa :

“Setiap pegawai menyadari tupoksi mereka khususnya di bidang rehabilitasi sosial, menyadari bahwa mereka merupakan abdi masyarakat untuk melayani dan membina khususnya orang cacat, anak-anak terlantar, dan mereka yang termasuk dalam PMKS. Kesadaran bukan hanya berada di lingkungan Dinas Sosial akan tetapi masyarakat pula harus sadar bagaimana penanganan penyandang Disabilitas melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi, bekerja sama dengan pemerintah Desa lewat musrembang desa, Dinas Sosial berupaya meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang penanganan penyandang Disabilitas melalui program – program dari Dinas Sosial “ (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019)

Wawancara selanjutnya bersama kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dengan inisial R.L, beliau mengatakan :

“Jika menilai tingkat kesadaran para ASN khusus yang ada di Bidang Rehabilitasi Sosial cukup tinggi, kenapa? Saya melihat bagaimana mereka kerja di lapangan dengan bersungguh – sungguh, mereka mengerjakan tugas hingga larut malam untuk memenuhi target pelayanan yang mereka kerjakan pada hari itu juga ”. (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019)

Pernyataan yang sama di sampaikan oleh Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO dengan inisial F.D, dalam wawancara bersama beliau mengatakan :

“ Saya dan teman – teman begitu menyadari bahwa kami mempunyai peran untuk melayani orang – orang berkebutuhan khusus. Akan tetapi sejalan dengan itu kami berupaya menyadarkan terlebih kepada masyarakat tentang penanganan kaum Disabilitas melalui program – program dari Dinas Sosial lewat kegiatan sosialisasi berupa edukasi agar masyarakat lebih cerdas dalam menangani permasalahan kaum Disabilitas ”(Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019).

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil mewancarai beberapa masyarakat yang mempunyai anggota keluarga Disabilitas, dalam wawancara bersama dengan salah satu orang tua yang anaknya merupakan penyandang Disabilitas dengan inisial D. H, beliau mengatakan “

“ sampai saat ini usia anak saya sudah menginjak umur 20 tahun, tetapi belum pernah mendapat layanan dari Dinas Sosial. Anak kami hanya mendapat fasilitas belajar di SLB(Dinas Pendidikan, serta dapat obat – obatan dari Dinas Kesehatan. Kalau dari Dinas Sosial sampai saat kami tidak tau apa – apa ” (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2019)

Sama halnya yang dikatakan oleh seorang bapak yang mempunyai anak yang dikategorikan disabilitas ganda dengan inisial B.U, dari wawancara bersama beliau dikatakan :

“ Saat ini anak saya hanya mendapat fasilitas belajar di SLB, kalau bantuan atau pelayanan dari Dinas Sosial saya tidak tauh ” (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 15 November 2019).

Jawaban yang sama dikatakan oleh seorang bapak yang peneliti temui ketika berada dalam sebuah acara, terlihat bapak tersebut menggendong anaknya penyandang Disabilitas yang tinggal di Kecamatan Taluditi, dalam wawancara singkat tersebut beliau mengatakan :

“ Anak saya tidak pernah mendapat bantuan sama sekali dari pemerintah. Sebenarnya mau disekolahkan di SLB, karena jaraknya cukup jauh serta biaya yang tidak sedikit tidak memungkinkan kami menyekolahkannya.. Kalau dari Dinas Sosial sejauh ini saya tidak tauh mengenai program – program mereka, sehingga dengan penuh kasih sayang kami berusaha merawat anak ini, dan berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah” (Hasil wawancara pada tanggal 11 November 2019).

4.2.2. Faktor Organisasi

Dalam penelitian ini faktor organisasi cukup berpengaruh terhadap kebijakan dalam menentukan tingkat keberhasilan dari sebuah pelayanan yang efektif dan memiliki proses berkesinambungan yang terstruktur. Rehabilitasi sosial kepada penyadang Disabilitas diperlukan support serta dukungan dari semua pihak tidak terkecuali dari organisasi pemerintahan atau swasta yang mempunyai fungsi yang sama dalam mensejahterakan kaum Disabilitas. Ini tentunya sangat penting, karena penanganan yang sangat kompleks, diperlukan koordinasi dan saling keterkaitan persepsi antar organisasi untuk menciptkan pelayanan rehabilitasi yang efektif kepada penyandang Disabilitas.

Dalam wawancara dengan kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dengan inisial A.J., beliau mengatakan :

“ Sejauh ini Dinas Sosial belum membangun kerjasama, terutama dengan Dinas Pendidikan yang membawahi SLB. Karena fungsi mereka sama dengan kita, maka kita membiarkan mereka menjalankan fungsi itu, kita tidak bisa intervensi”(Sumber : Hasil wawancara pada 25 November 2019)

Sejalan dengan jawaban diatas melalui wawancara dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO dengan inisial F.D, disampaikan :

“ Dengan pihak lain khusus dengan SLB karena yang mengelolahnya adalah Dinas Pendidikan kami tidak ada andil dalam program mereka akan tetapi kami memfasilitasi apabila ada anak – anak yang tergolong Disabilitas yang mau

sekolah di SLB kami memfasilitasi saja. Akan tetapi beberapa waktu lalu kami bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan dalam pelatihan ketrampilan bagi Disabilitas mental serta kami sinergikan juga dengan program-program yang ada dengan kementerian “.(Sumber :Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019).

Langkah – langkah lain dilakukan oleh Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas lain atau dari pihak swasta dalam mengupayakan tercapainya pelayanan rehabilitasi sosial lewat pengembangan dan ketrampilan kepada para kaum Disabilitas, seperti dalam wawancara dengan kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dengan inisial R.L, mengatakan:

“ Seperti kejadian kemarin kami dapat info ada disabilitas yang berkeliaran itu kami kunjungi, selanjutnya kami kumpulkan para pemangku kebijakan yang terkait, seperti Dinas Kesehatan bagaimana kontribusi mereka dalam hal ini, dan juga kami bekerjasama dengan LKS Kabupaten Pohuwato untuk tempat aduan terkait kaum Disabilitas yang berkeliaran.” (Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019).

Upaya – upaya tengah dilakukan oleh Dinas Sosial untuk kesejahteraan para kaum Disabilitas. Mengatasi permasalahan Disabilitas bukan dengan waktu yang singkat, perlu proses dan pelayanan berkesinambungan dengan tahapan – tahapan sesuai dengan tingkat penyakit secara fisik atau mental yang dialami oleh penyandang Disabilitas itu sendiri. Pentingnya sebuah organisasi yang bisa bekerjasama untuk penanganan kaum Disabilitas agar pelayanan rehabilitasi sosial ini berjalan secara efektif dan komprehensif.

4.2.3. Faktor Pendapatan

Sebuah program yang baik tidak akan tercipta tanpa adanya dukungan secara anggaran atau pendapatan sebuah organisasi. Pentingnya sebuah pendapatan untuk memaksimalkan setiap program yang ada yang nantinya akan mempengaruhi tingkat keberhasilan setiap proses pelayanan yang ada.

Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato menangani 26 PMKS(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang termasuk di dalamnya para kaum Disabilitas, dengan itu sokongan dana yang cukup sangat mempengaruhi proses pelayanan Rehabilitasi Sosial kepada Penyandang Disabilitas.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dengan inisial A.J. beliau mengatakan :

“Daerah kita masih minim jumlah APBD jadi kita menyesuaikan. Artinya jika APBD kita besar, saya besar hati untuk menuntaskan semua permasalahan sosial yang ada. Dari sekian jumlah yang kita tangani,, semuanya merupakan kategori penyandang Disabilitas yang sudah parah. Kami mengidentifikasi sejauh dia masih bisa mandiri, dan keberadaanya tidak mengganggu fungsi sosialnya sendiri, itu kita belum tangani karena keterbatasan anggaran tadi.Saat ini kami ambil sedikit – sedikit yang penting mana yang menonjol kasusnya, itu yang kita tangani””(Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019).

Sejalan dengan pernyataan diatas dalam wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato beliau mengatakan :

“Di bidang Rehabilitasi Sosial penanganannya bukan hanya permasalahan kaum Disabilitas,ada hampir 26 PMKS yang harus kami tangani sehingga kami mengupayakan agar semua tersentuh, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia “(Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019).

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Kepala bidang Rehabilitasi Sosial dengan inisial R.L, dalam wawancara tersebut, beliau mengatakan :

“Anggaran kami miliki cukup minim. Setiap anggaran yang ada kami programkan khusus untuk kaum Disabilitas yaitu pemberian alat bantu seperti, alat pendengar, tongkat ketek, kaki palsu, serta kami beri bantuan untuk modal untuk usaha. Anggaran tersebut baru keluar tahun ini, mudah – bisa berkesinambungan kedepannya. Kalau jumlah anggaran kepada penyandang Disabilitas, kami tidak bisa menyebutkan secara nominalnya berapa karena penanganan PMKS di bidang Rehabilitasi ada sebanyak 26 termasuk penyandang Disabilitas, jadi kami bagi mana yang darurat itu yang kami sentuh dengan program yang ada” (Sumber : Hasil wawancara tanggal 21 November 2019).

Hasil wawancara selanjutnya antara peneliti dengan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO dengan inisial F.D mengatakan :

“Jadi kembali ke konsekuensi anggaran, target kita di RPJMD setiap tahun – nya kami berikan sentuhan program seratus penyandang Disabilitas per tahunnya, berupa pelatihan ketrampilan, bimbingan motivasi, dan pemberian alat bantu agar jumlah penyandang Disabilitas dapat tersentuh walaupun bertahap karena kendala di anggaran itu tadi” (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019)

4.2.4. Faktor Kemampuan dan Ketrampilan

Kemampuan dan ketrampilan atau biasa kita sebut dengan skill merupakan instrumen penting dalam melaksanakan kegiatan atau pelayanan. Skill yang memadai akan berpengaruh pada tingkat efektifitas dari sebuah program yang sementara dijalankan.

Dalam wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dengan inisial A.J. :

“ Kalau dipersentasikan masih 70%, ya mengarah ke 80%. Saya akui itu karena tidak semua staff, skill mereka akan bertumbuh secepat kilat. Sebenarnya begini, mereka ditempatkan disini ada yang karena sudah lama ada juga karena faktor keterpaksaan. Nah, kedua kategori ini kami kolaborasikan, skill apa yang mereka bisa kami pakai sesuai bidang yang ada.”(Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019).

Menciptakan pelayanan yang efektif dibutuhkan orang yang mampu bekerja efektif yang tentunya orang tersebut yang memiliki skill atau kemampuan yang bisa menunjang proses pelaksanaan program dari Dinas Sosial. Mengurus atau menangani masalah sosial khusus bagi penyandang Disabilitas tentunya membutuhkan skill khusus. Terlebih dari itu menyikapi masalah kaum Disabilitas dibutuhkan jiwa sosial artinya pekerjaan harus didasari hati yang ikhlas untuk menolong mereka yang memiliki cacat secara mental dan secara fisik, merasa kita sama dan tidak ada yang berbeda dalam kesamaan hak sebagai warga Negara Indonesia.

Jawaban berbeda di sampaikan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, dalam wawancara tersebut beliau mengatakan :

“ Rata – rata saya lihat di masing – masing bidang ada perwakilan – perwakilan yang memang memiliki standar kualitas untuk menangani kasus bidangnya masing - masing. Dan jelas para ASN yang ada memiliki skill yang berbeda – beda, namun dari situlah mereka berkolaborasi untuk memecahkan masalah, setiap bidang saling bahu – membahu, jika ada bidang yang perlu bantuan bidang yang lain tentunya mensupport, itu artinya mereka ada kerja tim agar setiap pelayanan kepada masyarakat khusus bagi mereka penyandang Disabilitas bisa berjalan dengan semaksimal mungkin kami lakukan” (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang Rehabilitasi Sosial dengan inisial R.L, beliau mengatakan :

“ Dari pengalaman yang mereka miliki, saya rasa sudah cukup menunjang setiap program – program yang ada di bidang Rehabilitasi Sosial khusus dalam melayani kaum Disabilitas untuk kesejahteraan sosial tentunya, namun namanya masih manusia pastinya ada kekurangan yang dimiliki, tapi tidak terlalu nampak sehingga program Rehabilitasi Sosial kepada penyandang Disabilitas bisa berjalan maksimal” (Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019).

Jawaban berbeda disampaikan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO dengan inisial F.D mengatakan :

“ Sebenarnya untuk memahami setiap persoalan kaum Disabilitas bukan hanya diperlukan skill tapi harus disertai dengan jiwa dan semangat untuk menolong sesama khusus bagi mereka kaum penyandang Disabilitas. Namun skill tetap perlu, jika ada pelatihan – pelatihan setiap staff diharuskan ikut pelatihan karena itu akan menunjang kegiatan dan program – program kami selanjutnya”(Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019).

Penanganan dalam permasalahan kaum Disabilitas terbagi atas dua yaitu penanganan bagi kaum Disabilitas mental maupun fisik, sehingga membutuhkan skill atau ketrampilan khusus dalam penanganannya. Melihat semua ASN berlatar belakang pendidikan Ilmu Sosial, maka tidak mungkin Dinas Sosial secara langsung menangani kaum Disabilitas mental yang membutuhkan perawatan secara medis, karena itu langkah – langkah yang dilakukan untuk penanganan selanjutnya

seperti yang dikatakan oleh Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO dengan inisial F.D, dikatakan :

“Bagi Disabilitas mental kami buat rujukan untuk pengobatan secara medis. Untuk Disabilitas mental yang terlibat di dalamnya bukan hanya Dinas Sosial, ada Dukcapil, Dinas Kesehatan dan dibawahnya ada Puskesmas. Yang memfasilitasi semua dari Dinas Sosial namun penanganan secara medis seperti injeksi, diberikan obat oleh Dinas Kesehatan. Jadi kami hanya mendampingi saja.” (Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019).

4.2.5. Faktor Sarana Pelayanan

Sarana pelayanan merupakan instrumen penting dalam menciptakan pelayanan yang efektif, berkesinambungan, terintegrasi sehingga dengan adanya sarana pelayanan penanganan masalah kepada kaum penyandang Disabilitas bisa dilakukan secara komperhensif. Pentingnya sarana pelayanan Rehabilitasi sosial khusus penyandang Disabilitas akan menciptakan pelayanan yang akan lebih terarah sesuai penanganan berdasarkan tingkat kondisi dari penyandang disabilitas tersebut.

Adanya sarana pelayanan berarti menciptakan lingkungan baru bagi penyandang Disabilitas, sehingga para penyandang Disabilitas bisa di relokasi di tempat tersebut mendapat keluarga atau lingkungan mereka sendiri yang tentunya menjauhkan mereka dari tindakan diskriminasi yang membuat mereka lebih percaya diri, bisa bersosialisasi dengan sesama mereka sehingga pelayanan Rehabilitasi Sosial bisa berjalan secara terstruktur dan penanganan dapat dilakukan secara komperhensif.

Dalam wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato dengan inisial A.J. beliau mengatakan :

“ Sampai saat ini kami belum mempunyai lokasi untuk itu karena persoalan anggaran. Sudah kita bicarakan dengan pak Bupati namun lagi – lagi pada saat penganggaran tidak dapat titik temu. Rencana tahun depan kami akan usulkan kembali untuk pengadaan rumah singgah khusus PMKS termasuk didalamnya para penyandang Disabilitas agar penanganan untuk permasalahan penyandang Disabilitas lebih komprehensif”(Sumber : Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019).

Sejalan dengan itu melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato beliau mengatakan:

“ Kalau sarana untuk penyandang Disabilitas kami belum ada, karena terkendala soal anggaran yang ada. Anggaran Dinas Sosial khusus Rehabilitasi Sosial hanya untuk pengadaan alat bantu, serta pemberian modal usaha”(Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 25 November 2019)

Hasil penelitian lain dalam wawancara dengan kepala bidang Rehabilitasi Sosial dengan inisial R.L, :

“ Itulah yang sementara kita programkan, yaitu rumah singgah.Banyaknya PMKS yang ada di lapangan, seperti ODGJ, anak – anak terlantar, dan lain sebagainya itu yang kami bahas dengan organisasi LKKS bersama Bupati. Kami sarankan setidaknya kami memiliki rumah singgah, untuk segala PMKS yang kami temukan di lapangan kami relokasikan ke rumah singgah, kami lakukan pembinaan sebelum di kembalikan kepada keluarga ” (Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019)

Pernyataan yang sama disampaikan Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO dengan inisial F.D menyampaikan :

“ Sementara kita usulkan untuk pengadaan rumah singgah. Supaya permasalahan sosial khusus penyandang Disabilitas bisa tertangani secara komprehensif ” (Sumber: Hasil wawancara pada tanggal 21 November 2019)

Betapa pentingnya sarana pelayanan bagi para penyandang Disabilitas semacam rumah singgah. Agar ketika mereka kedapatan atau kena razia mereka bisa ditampung di tempat khusus, disanah mereka mendapat pembinaan secara terstruktur, pelatihan dan ketrampilan, mendapat pengobatan, semuanya untuk mengembalikkan keberfungsian sosial mereka agar mereka dapat diterima kembali

bersosialisasi dengan masyarakat umum, bebas dari diskriminasi dan bisa hidup normal kembali.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Efektifitas merupakan sebuah konsep untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah program. Pelayanan yang efektif tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung baik dari segi SDM maupun dari sisi keuangan yang tentunya menunjang setiap program dan faktor lainnya yang mempengaruhinya.

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas tentang efektifitas pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas sesuai Permensos Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan beserta data yang diterima peneliti dalam penelitian ini dimana program pelayanan rehabilitasi sosial belum berjalan maksimal sebagaimana mestinya. Program Rehabilitasi yang sudah berjalan sering mengalami banyak hambatan – hambatan, baik secara regulasi, anggaran, maupun SDM yang tersedia, yang tentunya berdampak pada tingkat efektifitas dari program Rehabilitasi tersebut.

Maka dari itu faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas pelayanan Rehabilitasi sosial kepada penyandang Disabilitas seperti yang di kemukakan oleh H.A.S Moenir (2006:88) yaitu :

1. Faktor Kesadaran

Faktor kesadaran merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi tingkat efektifitas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, tingkat kesadaran dari ASN yang bekerja di Dinas Sosial Pohuwato, benar – benar menyadari tupoksi

mereka sebagai pelayan masyarakat, yang melayani masyarakat yang termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus para kaum Disabilitas. Pekerjaan sosial ini tentunya dibutuhkan orang – orang yang mempunyai jiwa sosial yang menyadari pentingnya kontribusi mereka untuk menuntaskan permasalahan sosial yang ada dalam masyarakat, khusus bagi penyandang Disabilitas.

Namun temuan lain dalam penelitian ini dimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai program Rehabilitasi Sosial sangat minim. Ini terlihat dalam hasil wawancara antara peneliti bersama para informan yang memiliki anggota masyarakat penyandang Disabilitas. Mereka belum mengetahui mengenai penanganan kaum Disabilitas lewat program Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial sehingga cenderung mereka terpaksa menerima keadaan yang ada. Sejauh ini mereka hanya menerima bantuan dari Organisasi pemerintah atau Swasta lainnya namun khusus dari Dinas Sosial belum ada. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan dimana Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato sejauh ini telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan aparatur pemerintah desa lewat musrembang desa, mensosialisasikan program pelayanan Dinas Sosial salah satunya pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Namun hasil temuan peneliti dimana sosialisasi yang telah dilakukan Dinas Sosial kurang terarah, artinya sosialisasi dilakukan dengan cara menumpang dengan kegiatan desa mengakibatkan fokus sosialisasi yang seharusnya diarahkan kepada anggota masyarakat yang mempunyai anggota keluarga penyandang Disabilitas kurang terarah karena biasanya massa yang menghadiri kegiatan desa

hanya aparat desa atau masyarakat biasa, sehingga fokus sosialisasi kurang terarah dengan tepat.

Hal ini yang mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat dalam penanganan kaum Disabilitas melalui program – program Dinas Sosial sangat minim bahkan melalui penulusuran yang dilakukan masyarakat tidak menyadari sama sekali.

2. Faktor Organisasi

Masalah penyandang Disabilitas dibutuhkan penanganan secara komprehensif artinya proses keberfungsi sosial kepada penyandang Disabilitas harus dilakukan secara terstruktur berdasarkan tingkatan keterbatasan yang dimiliki dan diperlukan waktu yang cukup untuk masa penyembuhannya sehingga pentingnya peran dari organisasi atau pihak lain dalam berkontribusi di dalamnya . Dari hasil wawancara diatas bersama para informan, terlihat upaya – upaya yang tengah dilakukan oleh Dinas Sosial dalam rangka hubungan kerjasama dengan organisasi pemerintah lainnya yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan,, LKS dan LKKS serta masyarakat Kabupaten Pohuwato dalam penanganan mengatasi permasalahan kaum Disabilitas.

Berdasarkan hasil temuan lain dalam penelitian ini dimana Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato sejauh ini tidak memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang mengelolah SLB. Padahal kedua Organisasi Pemerintah Daerah ini memiliki tujuan dan fungsi yang sama meski fokusnya berbeda dalam menangani kaum Disabilitas, namun dari hasil temuan sampai saat ini antara kedua

Dinas yang terkait sejauh ini masih berjalan sendiri belum menciptakan hubungan kerjasama atau berkolaborasi ide dan gagasan dalam penanganan kaum Disabilitas.

3. Faktor Pendapatan

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini persoalan anggaran atau pendapatan yang dianggarkan kepada kaum penyandang Disabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato tergolong sangat minim. Ini tentunya berdampak pada setiap aspek program yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato untuk menangani 26 PMKS termasuk para kaum Disabilitas terlihat sangat tidak efektif penanganannya karena persoalan anggaran yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang ada.

Hasil temuan lainnya menunjukkan meski persoalan anggaran yang sangat minim, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato menggunakan skala prioritas, memfokuskan pelayanan kepada kaum Disabilitas yang tergolong sudah berat agar terlebih dahulu disentuh oleh program dari Dinas Sosial, selain itu program – program yang dilakukan sejalan dengan kegiatan - kegiatan yang di Kementerian Sosial sehingga tidak memakan banyak anggaran dalam merealisasikan program – program yang sudah dibuat.

4. Faktor Kemampuan dan Ketrampilan

Penunjang tingkat keberhasilan sebuah program salah satunya berasal dari faktor SDM yang ada. ASN yang bekerja di Dinas Sosial merupakan alat organisasi untuk menjalankan setiap program yang ada khususnya menangani permasalahan sosial bagi para kaum Disabilitas.

Hasil penelitian ini menunjukkan dimana skill yang dimiliki oleh ASN yang bekerja di Dinas Sosial rata – rata sudah diatas standar di tambah dengan pengalaman bekerja sehingga menunjang proses pelakasanaan tugas di bidang masing – masing. Temuan lainnya meski masih terdapat kekurangan dan kendala di dalam bekerja setiap bidang saling bekerjasama dalam mengatasi permasalahan yang ada secara bersama – sama. Selanjutnya dari hasil wawancara menunjukkan dimana pekerjaan di bidang sosial ini bukan hanya membutuhkan kemampuan atau skill namun harus dibarengi dengan sikap dan jiwa sosial karena dalam bidang pekerjaan ini banyak melayani masyarakat yang memiliki masalah sosial.

Dalam menangani persoalan kaum Disabilitas tidak hanya di butuhkan skill atau pengalaman bekerja namun harus disertai dengan jiwa sosial dan sikap prikemanusiaan untuk membantu seseorang dalam mengembalikan keberfungsi sosial, artinya pekerjaan ini bukan didasari oleh uang namun seharusnya didasari dari sikap hati untuk melayani para kaum Disabilitas supaya bisa diterima kembali dengan lingkungan masyarakat normal lainnya agar bisa menjadi seseorang yang produktif dalam masyarakat.

5. Faktor Sarana Pelayanan

Sejauh ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato belum memiliki fasilitas untuk menampung para kaum Disabilitas. Anggaran yang belum memadai menjadi faktor penghambat Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato belum bisa membangun sarana untuk para kaum Disabilitas.

Menangani permasalahan Disabilitas sangat tidak efektif apabila tidak ada layanan untuk menampung mereka, sehingga membuat penanganannya tidak

berjalan secara komprehensif. Setiap laporan yang masuk ke Dinas Sosial dimana ada Disabilitas yang berkeliaran di lingkungan masyarakat hanya diberikan bimbingan selanjutnya dikembalikan kepada keluarga tanpa ada penanganan lebih. Ini yang membuat masih banyak para kaum Disabilitas yang masih terlihat di sudut – sudut kota Marisa baik mereka yang termasuk cacat secara fisik maupun secara mental.

Dari hasil penelitian, Dinas Sosial sedang membahas untuk membangun rumah singgah bagi penyandang kesejahteraan masalah sosial termasuk bagi kaum Disabilitas. Program ini sementara diusulkan tahun ini bersama Bupati Pohuwato agar Kabupaten Pohuwato mempunyai Rumah Singgah untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yaitu bagaimana Efektivitas Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kepada Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pohuwato, maka peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang Disabilitas oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato belum berjalan secara dengan efektif dilihat dari berbagai faktor antara lain adalah sebagai berikut :

1. Faktor Kesadaran

Kesadaran merupakan wujud kepedulian terhadap suatu keadaan yang terjadi yang mampu mempengaruhi tingkat efektifitas. Dari hasil pembahasan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan dimana tingkat kesadaran masyarakat mengenai penanganan kaum Disabilitas melalui program – program dari Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato masih kurang. Hal ini diakibatkan karena proses sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial kepada masyarakat kurang terarah, karena dilakukan dengan istilah *menumpang* dengan kegiatan desa, yang pada umumnya massa yang hadir dalam kegiatan tersebut masyarakat umum, sehingga fokus Dinas Sosial kepada masyarakat khusus yang memiliki keluarga penyandang Disabilitas tidak terarah dengan tepat.

2. Faktor Organisasi

Faktor organisasi dalam konteks ini, peneliti melihat dimana peran Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato menjalin kerjasama dengan organisasi lain baik dari

pemerintah ataupun swasta dalam berkontribusi mengatasi permasalahan penyandang Disabilitas. Dari hasil pembahasan dalam poin ini menggambarkan dimana Dinas Sosial telah berupaya melibatkan pihak – pihak atau organisasi lain dalam bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang Disabilitas contohnya dengan LKS dan LKKS Kabupaten Pohuwato untuk meninjau para kaum Disabilitas yang berkeliaran, Dinas Ketenagakerjaan dalam hal pembinaan ketrampilan, Dinas Kesehatan dalam hal penanganan medis. Temuan lain dalam penelitian ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato belum menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan yang mengurus SLB Kabupaten Pohuwato yang sama – sama menangani kaum Disabilitas. Padahal apabila keduanya memiliki hubungan erat dalam mengatasi permasalahan Disabilitas melalui ide atau gagasan tentu mampu memberikan terobosan baru dalam mensejahterakan kaum Disabilitas.

3. Faktor Kemampuan dan Ketrampilan

Skill atau kemampuan sangat dibutuhkan untuk menunjang tingkat keberhasilan dari sebuah program. Dilihat dari SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial tentunya sudah diatas rata – rata namun pengembangan SDM lewat pelatihan – pelatihan yang ada terus dikembangkan karena kebutuhan yang ada. Masih adanya kekurangan SDM yang dimiliki khusus untuk menangani Disabilitas secara mental yang tentunya dibutuhkan penanganan medis, Dinas Sosial tentunya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dalam penanganan selanjutnya untuk diberikan obat – obatan dan diagnosa selanjutnya apakah Disabilitas ini perlu penanganan di Rumah sakit jiwa atau tidak.

4. Faktor Pendapatan

Ketersediaan anggaran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato untuk para penyandang Disabilitas masih minim sehingga penanganan masalah penyandang Disabilitas lewat program Rehabilitasi Sosial tidak berjalan secara efektif. Tidak adanya balai atau panti rehabilitasi sosial bagi kaum Disabilitas untuk menampung mereka membuat program Rehabilitasi Sosial kurang efektif karena penanganannya tidak berjalan secara komprehensif. Disisi lain program Rehabilitasi sosial yang telah dilakukan hanya mengandalkan anggaran seadanya dengan menggunakan skala prioritas,dan mengikuti program – program dari Kementerian Sosial dalam hal bantuan secara fisik seperti pemberian kursi roda, tongkat ketek,alat pendengar dan lain sebagainya.

5. Faktor Sarana Pelayanan

Sejauh ini Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato belum mempunyai sarana pelayanan untuk menampung para kaum Disabilitas. Faktor anggaran menjadi penghambat Dinas Sosial membangun sarana pelayanan, namun Dinas Sosial tengah berupaya tahun ini memperjuangkan agar di Kabupaten Pohuwato tersedia sarana Rumah Singgah untuk para penyandang Disabilitas agar pelayanan Rehabilitasi Sosial bisa berjalan secara maksimal.

5.2. Saran – saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan penyandang Disabilitas khusus

bagi masyarakat yang mempunyai anggota keluarga penyandang Disabilitas, menyuarakan hak – hak kaum Disabilitas agar kaum Disabilitas ini tidak terpinggirkan atau menjadi sampah masyarakat namun bisa diberdayakan dan menjadi manusia produktif di masyarakat.

2. Kerjasama dengan pihak lain harus berjalan secara terstruktur dan berkesinambungan. Program dari Dinas Sosial untuk penanganan masalah kaum Disabilitas bisa di kolaborasikan dengan pihak lain perlu ditingkatkan khususnya dengan Dinas Pendidikan yang mengelolah SLB. Disisi lain Dinas sosial perlu menyisir setiap penyandang Disabilitas yang suka berkeliaran di lingkungan masyarakat dengan bekerjasama dengan Satpol Kabupaten Pohuwato untuk melakukan razia atau patroli agar mereka bisa di pindahkan di sentuh dengan program – program yang ada dan dikembalikan kepada keluarga.
3. Dinas Sosial perlu memperjuangkan hak – hak penyandang Disabilitas dalam persoalan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah bersama DPRD untuk membangun sarana pelayanan agar bisa menampung para penyandang Disabilitas sehingga pelayanan Rehabilitasi Sosial kepada penyandang Disabilitas dapat berjalan secara komprehensif, serta dengan anggaran yang memadai bisa mendukung program – program Dinas Sosial lainnya untuk menangani permasalahan sosial yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Danim, Sudarwan. (2010). *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Georgopolous dan Tannenbaum. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Handayaningrta, Soewarno. 1982. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Management*. Jakarta: PT Inti Idayu Press.

Agung, Kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Moenir, H.AS, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Bumi Aksara.

Jakarta 2008

Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.

Sondang P. Siagian. 1987. *Manajemen Modern*. Jakarta: PT. Gunung Agung

Steers, Richard M, 1998, *Efektivitas Organisasi*, Terjemahan, Jakarta, PPm, Erlangga.

Wijaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta Jaya, Jakarta.

Wibhawa, Budi dkk. 2010. *Dasar- Dasar Pekerjaan sosial*. Bandung: Widya padjadjaran

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 19 Tahun 2011 *Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.*

Undang - Undang Nomor. 11 Tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*,

Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1997 tentang *Penyandang Cacat*

Internet

Othenek. (2008). *Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas.*

<http://literaturbook.blogspot.co.id> (diakses tanggal 5 mei 2019)

Tersedia di <http://https://www.scribd.com/doc/233550836> (diakses tanggal 5 mei 2019)

Gronroos dalam Ratminto(2005: 2) */Teori-Pelayanan-Dan-Konsep-Pelayanan*

[:// https://www.scribd.com/doc/233550836](http://https://www.scribd.com/doc/233550836) (diakses tanggal 5 mei 2019)

WalterFriedlander, *Pengertian Kesejahteraan Sosial.* Tersedia di <http://www.mainotes.com/2015/12/> (diakses tanggal 8 mei 2019)

<https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/170/112> (tangga^l akses 10 mei 2019)

<http://mediadisabilitas.org/uraian/ind/rehabilitasi-sosial-fisik>(tangga^l akses 10 mei 2019)

<http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13580>(tangga^l akses 14 mei)

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/>(tangga^l akses 8 mei 2019)

<https://pojok6.com/2018/12/11/masuk-dalam-dpthp-2-ini-jumlah-total-odgj-di-gorontalo/>(diakses tanggal 15 mei 2019).

<https://kronologi.id/tag/hari-disabilitas/>(Diakses 13 Januari 2020)

DAFTAR WAWANCARA

1. Faktor Kesadaran

Bagaimana anda melihat tingkat kesadaran para ASN dalam bekerja sesuai tupoksi yang mereka miliki, serta sudah sejauh mana sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial mengenai kesadaran masyarakat tentang penanganan kaum Disabilitas melalui pelayanan Rehabilitasi Sosial dari Dinas Sosial khusus untuk mengatasi permasalahan kaum Disabilitas?

2. Faktor Organisasi

Apakah Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato menjalin hubungan kerjasama dengan Organisasi baik dari swasta atau pemerintah lainnya dalam mendukung kegiatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial?

3. Faktor Pendapatan

Bagaimana ketersediaan anggaran yang dimiliki Dinas Sosial yang dialokasikan khusus untuk mengatasi permasalahan kaum Disabilitas?

4. Faktor Kemampuan dan Ketrampilan

Bagaimana anda melihat Skill yang dimiliki oleh ASN yang bekerja terlebih mereka yang mengurus tentang permasalahan kaum Disabilitas?

5. Faktor Sarana Pelayanan

Apakah Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato memiliki sarana untuk menampung para kaum Disabilitas?



Foto dokumentasi peneliti bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato



Foto dokumentasi peneliti bersama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato



Foto dokumentasi peneliti bersama Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan KPO Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato



Foto wawancara peneliti bersama salah satu keluarga penyandang Disabilitas



Foto dokumentasi peneliti bersama informan yang mempunyai anggota keluarga penyandang Disabilitas



Foto dokumentasi hasil wawancara peneliti bersama informan yang mempunyai anggota keluarga penyandang Disabilitas



Foto dokumentasi hasil wawancara peneliti dengan informan yang memiliki anggota keluarga penyandang Disabilitas



Foto dokumentasi dengan masyarakat mengenai kesadaran tentang penanganan penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato

